

**Implementasi Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Minahasa Selatan**

Alex Nicolas Ratag¹

Daud M. Liando²

Ventje Kasenda³

Email Korespondensi: Ratagnicolas@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan. Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin lama semakin besar. Pada era globalisasi ini, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan penambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan permasalahan baru, diantaranya adalah timbulnya masalah sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, A. G. (2005) yaitu : Standar dan ukuran, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Sumber daya yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dalam implementasi program Bank Sampah sudah terstruktur baik dimulai dari bidang pengelolaan sampah bank sampah, pengamanan, kepala sub bagian tata usaha , unit penjemputan , unit pemilahan , unit penimbangan , unit pengepakan , unit penjualan dan unit pemeliharaan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Bank Sampah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara tentunya tak luput dari permasalahan persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan

Implementasi program bank sampah di Kabupaten Minahasa Selatan Melalui Dinas lingkungan Hidup bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah dalam membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan visi dinas lingkungan hidup "Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah terpadu, menuju kabupaten Minahasa Selatan yang maju, Berkepribadian, dan Sejahtera" dan Misi "Memastikan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum; Meningkatkan upaya pengurangan dan penanganan sampah secara komprehensif; dan memperkuat kapasitas sumber daya aparatur yang profesional". dalam perwujudan Kabupaten Minahasa Selatan yang nyaman, dan bersih dinas lingkungan hidup menerbitkan beberapa produk pelayanan diantaranya pengelolaan sampah. Melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Sulawesi Utara dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan sampah sejenis Rumah Tangga. Pembuatan kebijakan bank sampah merupakan kebijakan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup minahasa selatan yang tentunya menguntungkan bagi berbagai pihak dimana program bank sampah merupakan pencegahan terhadap buruknya pengelolaan sampah. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam pemeliharaan dan perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kegiatan dari sistem Bank Sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang di dasari oleh program pemerintah. Seperti bank konvensional pada umumnya, Bank sampah memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat dengan topangan dan dorongan oleh pemerintah. Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola sampah lewat pembinaan dari dinas lingkungan hidup. Karena Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani sampah. Sehingga sampah ditempat umum dan sampah dari masyarakat itu sendiri bisa berkurang dan bahkan bisa menambah nilai guna barang yang

sebelumnya dianggap tak berguna. Akan tetapi ada banyak keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah dinas lingkungan hidup tidak berperan aktif dalam masalah sampah ini, hingga banyak masyarakat tidak tau harus menyetorkan hasil sampah dimana karena masih sangat kurang dalam mengsosialisasikan apa itu bank sampah dan bagaimana penerapannya juga beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa mereka kecewa kepada dinas terkait yaitu dinas lingkungan hidup di Minsel karena hanya membuat program bank tapi tidak mengawasi setiap kecamatan dan kelurahan. hingga sangat sedikit sekali masyarakat yang mengetahui tentang program itu, sangat kurangnya sosialisasi apa itu bank sampah dan bagaimana Mekanisme bank sampah sehingga boleh menjadi salah satu pendapatan dari masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk memfokuskan penelitian ini memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, A. G. (2005) yaitu : Standar dan ukuran, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, yaitu ;

1. Standar dan Ukuran, dalam penelitian ini program tentang Bank Sampah perlu melihat variabel sasaran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya adalah ketersediaan sumber daya manusia dan daya finansial.
3. Karakteristik Agen Pelaksana untuk mengetahui berapa banyak pihak

yang dilibatkan dalam kegiatan Program Bank Sampah.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung di Di Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan dan melihat secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.
- 2) Teknik Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai permasalahan yang relevan dengan penulisan ini.
- 3) Teknik dokumentasi yaitu pengamatan yang dilakukan akan disertai dengan gambar-gambar riil yang terjadi di lapangan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Peneliti akan menterjemahkan dan menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dari hasil Penelitian yang ditemui oleh peneliti tentang Implementasi Program bank sampah di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Minahasa Selatan yang paling penting

untuk dilihat secara garis besarnya ialah implementasi program dan prasarana dinas lingkungan hidup yang belum mencapai keberhasilan implementasi program bank sampah di kabupaten minahasa selatan.

Maka dari itu peneliti akan membahas suatu konsep implementasi program bank sampah dengan merujuk indikator indikator menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono, A.G (2005) yaitu: (1) standar dan ukuran kebijakan,(2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana hal tersebut sebagai berikut :

1. Standar dan ukuran kebijakan

Pada indikator ini, peneliti melihat sejauh mana standar dan ukuran kebijakan terhadap implementasi program bank sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan, dari hasil yang di temukan di lapangan peneliti mengukur kinerja implemntasi tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh peran pelaksana, ukuran kinerja dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian. Pada program bank sampah di kabupaten minahasa dalam PERMEN LHK NO. 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah sudah tersampaikan di setiap kelurahan/ kecamatan yang dimana sudah ada beberapa bank sampah unit yang berdiri. Namun dalam hal ini masih ada beberapa juga kelurahan/ kecamatan yang belum bank sampah unit. Namun dari pemerintah dinas lingkungan hidup tetap mendorong setiap kelurahan/ kecamatan mendirikan bank sampah unit dan melakukan sosialisasi terhadap setiap masyarakat tentang manfaat dan tujuan bank sampah ini karena seiring peningkatan sumber daya

pembangunan dan sumber daya manusia maka peningkatan volume sampah juga meningkat maka program bank sampah ini dibutuhkan juga sumber daya yang optimal untuk mencapai keberhasilan.

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Namun dalam proses implementasi kebijakan fokus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sumber di kabupaten minahasa selatan memiliki potensi yang baik bagi kehidupan masyarakat, sumber daya optimal memungkinkan peningkatan penduduk di kabupaten minahasa selatan Sehingga seiring dengan peningkatan penduduk maka timbullah berbagai aktivitas seperti perkembangan pembangunan, maupun aspek aspek industri, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah. sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya sampah yang menumpuk di TPA

Pada indikator ini, peneliti akan melihat sumber daya implementasi program bank sampah diDinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan dalam menjalankan program bank sampah di kabupaten minahasa selatan. Dalam hal ini sumber daya yang di miliki oleh dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan dalam program bank sampah sudah terstruktur dengan baik di lihat dari bidang pengamanan, kepala bidang pengelolaan sampah, unit penjemput, unit pemilahan, unit penimbangan, unit pengepakan, unit penjualan dan unit pemeliharaan.karena bank

sampah merupakan aplikasi gerakan memilah sampah dan memanfaatkan kembali sampah namun dalam pemerintah dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan lebih lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam program bank sampah karena untuk mencapai keberhasilan program tersebut di butuhkan sumber daya yang optimal.

3. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma norma, dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan.

Pada indikator ini, peneliti melihat karakteristik agen pelaksana dalam implementasi program bank sampah di dinas kabupaten minahasa selatan di lihat dari proses kerja sama, disiplin dan tanggung jawab para agen pelaksana proses implementasi kebijakan dalam program bank sampah terbilang berhasil. Dimana pihak pemerintah dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan, pengelola memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah walaupun dari pihak pengelola terkadang mengubah harga pembelian tanpa menginformasikan kepada masyarakat.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar badan pelaksana menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan Komunikasi menentukan keberhasilan implementasi Seorang pembuat

kebijakan di harapkan mengetahui kewajiban mereka dalam pekerjaan. Pembuat kebijakan dapat berkordinasi dengan organisasi yang terkait dengan kebijakan yang di buat. Komunikasi yang dilakukan dengan pihak terkait harus jelas , transparan dan tepat. Komunikasi yang baik di harapkan membuat suatu komitmen dan satu misi antara pembuat kebijakan , implementor dan target sasaran bisa berjalan dengan baik. Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu yang sulit. Dalam berkomunikasi terkadang tidak bisa tersampaikan dengan baik sesuai yang di inginkan. Terdapat kendala atau penyimpangan yang disengaja atau tidak. Apabila suatu informasi yang dikomunikasikan salah atau sedikit menyimpang maka hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil kebijakan yang diharapkan. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses penciptaan dan saling menemukan pesan dalam satu hubungan jaringan tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah.

Komunikasi merupakan factor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide ide, keterampilan, peraturan dan lain lain yang menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu

yang sulit. Dalam berkomunikasi terkadang tidak bisa tersampaikan dengan baik sesuai yang di inginkan terdapat kendala atau penyimpangan yang disengaja atau tidak apabila suatu informasi yang dikomunikasikan salah atau sedikit menyimpang maka hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil kebijakan yang diharapkan.

Pada indikator ini peneliti menemukan terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi program bank sampah di kabupaten minahasa selatan bisa di bilang berjalan dengan baik. Namun kadang terkendala beberapa penyimpanan atau keterlambatan informasi yang kadang harga pembelian sampah tiba tiba menurun tanpa memberitahukan kepada nasabah/ masyarakat salah satu hal ini mebuat masyarakat kecewa namun kembali pihak pemerintah dinas lingkungan hidup dan pengelolaan menjelaskan dengan baik baik kepada masyarakat hingga masyarakat paham dan mau mengerti.

Penutup

Kesimpulan

1. Standar dan Ukuran Kebijakan

Implementasi program bank sampah di dinas kabupaten minahasa selatan program bank sampah di kabupaten minahasa selatan mengacu pada PERMEN LHK 14 Tahun 2021 Pemerintah desa/ kelurahan wajib membentuk bank sampah unit dan sudah tersampaikan dan berjalan dengan baik di setiap kelurahan dan kecamatan dimana sudah ada beberapa bank sampah unit yang berdiri di setiap kelurahan dan kecamatan yang disertai beberapa masyarakat yang berpartisipasi mendaftarkan diri menjadi nasabah

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dalam implementasi program Bank Sampah sudah terstruktur baik dimulai dari bidang pengelolaan sampah bank sampah, pengamanan, kepala sub bagian tata usaha , unit penjemputan , unit pemilahan , unit penimbangan , unit pengepakan , unit penjualan dan unit pemeliharaan. namun karena prrogram bank sampah merupakan aplikasi gerakan memilah sampah dan memanfaatkan kembali sampah, pemerintah untuk lebih lagi menarik masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait proses pengelolaan sampah

3. Karakteristik Agen Pelaksana

karakteristik agen pelaksana daalm implementasi program bank sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa selatan berjalan dengan baik dari stekholder pemerintah, pengelola dan masyarakat baik karena pihak pemerintah dan pengelola selalu memberi pemahaman tentang sampah dilihat ada beberapa masyarakat menyambut baik dengan adanya program tersebut dengan ikut langsung terlibat menjadi nasabah.

4. Komunikasi Antar Organisasi

pada komunikasi antar organisasi implementasi program bank berjalan dengan cukup baik dilihat. pemerintah menggunakan sosial media Whatsapp, platform dan lainnya untuk berkomunikasi dengan pihak pengelolaan bank sampah unit dan nasabah hingga komunikasi antara pengelola bank sampah dengan masyarakat berjalan dengan baik dimana pemerintah dinas dan pengelola selalu melakukan sosialisasi setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan bank sampah .

Saran

1. Untuk tercapainya keberhasilan standar dan ukuran kebijakan implementasi program bank sampah dari pemerintah dinas lingkungan hidup lebih lagi meningkatkan pengawasan terhadap program bank sampah dengan mendorong setiap kelurahan/ desa untuk membuat bank sampah unit agar dapat membantu meminimalisir sampah di TPA di kabupaten minahasa selatan.
2. Pemerintah kelurahan/ desa lebih lagi teribat untuk berperan aktif dalam program bank sampah dengan mempercepat pembangunan bank sampah unit karena untuk menopang keberhasilan program bank sampah dengan adanya sumber daya yang optimal dan serta mendorong juga masyarakat setempat terlibat dalam program ini dengan melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat.
3. agar terciptanya komunikasi yang baik dalam program yang telah berjalan dibutuhkan komunikasi yang baik. bagi pihak pemerintah dinas lingkungan hidup, pemerintah kelurahan, dan pengelola bank sampah unit untuk lebih lagi keterbukaan informasi kepada nasabah/ masyarakat mengenai tentang kenaikan atau penurunan harga sampah agar tidak terjadi kesalahpahaman karena untuk mencapai keberhasilan suatu program yang telah ditetapkan dibutuhkan keterbukaan komunikasi/ informasi.
4. Perlunya partisipasi masyarakat dalam program bank sampah agar dapat membantu pemerintah dalam mencapai keberhasilan

program bank sampah di kabupaten minahasa selatan.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21-34
- Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa. *Nusantara Journal of Economics*, 1(01), 14-27
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish: Social And Government*, 1(1), 33-37.
- Rahmat, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Karyawan PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kabupaten Aceh Singkil (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rohani, L. (2007). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan Tahun 2007.
- Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi (Vol. 138). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta cv
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi

- Kasus Bank Sampah Malang).
Jurnal Aspirasi, 5(1), 71-84.
- Ulfaridha, G. (2017). Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung
- Utami, E. (2013). Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses. Jakarta:

- Yayasan Unilever Indonesia
peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Sulawesi Utara dalam pengelolaan Sampah Rumah
- Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah